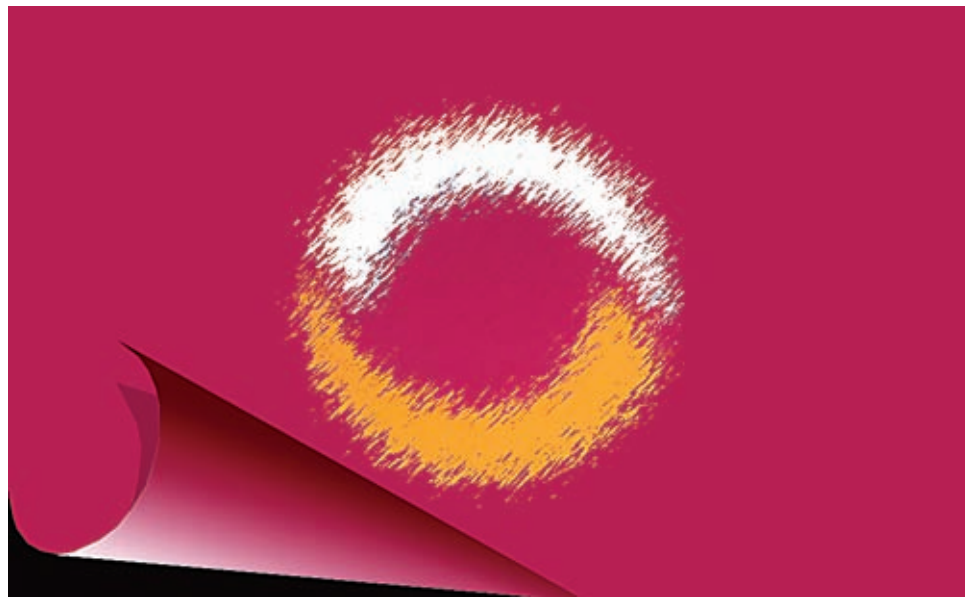




BEDAH EDITORIAL

RABU, 28 JULI 2010 - MEDIA INDONESIA



PATA AREADI

Penghentian Kasus Century

PARTAI Demokrat, partai terbesar dan berkuasa saat ini, akhirnya menunjukkan kemauan politiknya untuk menghentikan kasus Bank Century.

Seusai Rapat Paripurna DPR Senin (26/7), Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang berasal dari partai itu terang-terangan meminta kasus itu ditutup secara hukum. Alasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sudah menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.

Pernyataan Benny itu, meskipun tidak otomatis merupakan sikap resmi partai, jelas merefleksikan sikap Partai Demokrat dalam mengusut skandal Century. Dan sesungguhnya, gejala itu tidak mengejutkan. Sejak jauh hari, sebelum DPR membentuk Pansus Century, publik sudah skeptis dengan komitmen politik Partai Demokrat dalam mengusut tuntas skandal itu.

Namun, betapa pun tidak mengejutkan, pernyataan Benny sangat memprihatinkan.

Dalam kedudukan sebagai Ketua Komisi III DPR, yang mengurus masalah hukum, Benny justru meminta terang-terangan agar skandal Century ditutup secara hukum.

Semestinya sebagai pemimpin Komisi III, Benny justru memberikan tekanan politik kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar bertindak lebih cepat dan tegas dalam memproses siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab di depan hukum. Bukan mendorong kasus yang sudah terang menjadi gelap kembali.

Skandal Century adalah kejahatan besar yang harus dihukum. Bukan diberikan pengampunan bahkan sebelum para tersangkanya ditentukan dan kasusnya sampai di pengadilan.

Kasus Century ke Laut Lepas

UANG nasabah Bank Century dan kerugian negara harus dikembalikan.

6287861370xxx

memang demikian sikap koruptor-koruptor di negeri ini?

6281336706xxx

SIARKAN terus kasus Century.

6281946999xxx

BAGI yang menginginkan agar kasus Century dibekukan, tahankah kalian akan azab Allah yang akan mengadili kalian nanti? Sadarlah. Istigfarlah.

6281347605xxx

TERUTAMA setelah kasus Century, saya apatis terhadap kerja DPR dan pemerintah.

62818200xxx

PERKAWINAN politik bukan hanya antara penguasa dan pengusaha.

6281367591xxx

PENGHENTIAN kasus Century salah besar.

6281331443xxx

KEMBALIKAN uang penabung. Beres.

625117481xxx

KOK bisa, ya, orang macam itu jadi anggota DPR RI? Heran kita, kok mereka tidak tahu malu, bolos, tidak bekerja benar, tapi tetap terima gaji.

623170668xxx

KASUS Century sudah menuju laut lepas, semoga masih banyak yang memiliki hati nurani mengusut pelakunya sampai ke liang kubur.

6281271051xxx

GANTI presiden dulu baru bisa selesaikan kasus Century.

622197732xxx

YUSRIL menduga SBY tahu pelanggaran hukum di balik KSSK. Jadi, tolong jangan ditutup kasus Bank Century.

6281257860xxx

YUSRIL punya senjata akan bongkar kasus Century bila terus diatak-atik kasus Sisminbakum. Kok enggak dibongkar saja? Apa

Tidak Diberitakan

PADA ke mana tuh yang (sok) pahlawan pada waktu jadi anggota pansus? Sekarang enggak ada suaranya sama sekali karena sudah tidak lagi diberitakan media? Atau jangan-jangan panwas sudah 'tidur'?
Ncep Kazep Pizan

Analogi Sederhana

SEORANG murid TK kehilangan pensil di sekolah. Ia mengadu kepada gurunya lalu guru mulai menggeledah tas semua murid di kelas itu. Tapi, seorang murid *ngotot* menolak tasnya dibuka. Ada apa? Di mana pensil itu?
Phill M Sulu

Indonesia Gitu Loh

NAMANYA juga Indonesia, yang terang jadi gelap, yang gelap jadi terang. Capek deh.
Asikin MS

Hati Nurani

KALAU DPR (baca: Golkar dan Demokrat) dan SBY mau menutup, ya silakan saja. Kita harus mengerti bahwa penyelesaian secara politik itu di mana-mana, khususnya Indonesia, selalu menang. Silakan ditutup, silakan dikubur. Tetapi, uang nasabah tegaklah terampas oleh tangan-tangan tak berhati nurani?
Bungkam

Pecat

KALAU DPR tetap *ngotot* Boediono dan Sri Mulyani CS bersalah, dengan melempemnya Jaksa Agung dan Ketua KPK, mereka harus dipecat. Kalau sadar bahwa Jaksa Agung dan Ketua KPK ada benarnya, ya, sebaiknya mengubah sikap! Jangan membiarkan rakyat bingung karena kasus Century. Jangan gunakan kasus Century untuk isi bahan pemilu! Akhirnya rakyat akan bosan lihat partai-partai yang mempermainkan rakyat.
Sambodhosumani

FORUM

Klarifikasi Kementerian Agama Terkait Editorial

PADA edisi Sabtu, 24 Juli 2010, *Media Indonesia/Metro TV* menurunkan editorial *Bedah Editorial* dengan judul 'Efisiensi Pengelolaan Haji'. Setelah mencermati keseluruhan isi editorial tersebut, Kementerian Agama menyatakan prihatin dan sangat menyesalkan karena substansi editorial insinuatif dan tendensius. Itu tidak mendasar pada fakta dan data yang akurat sehingga menyesatkan pemahaman publik dan merusak citra Kementerian Agama.

Penjelasan dan klarifikasi Kementerian Agama, adalah sebagai berikut.

Terkait penyebutan BPIH tahun ini yang ditetapkan rata-rata sebesar US\$3.342 per jemaah juga dinilai masih kemahalan.

Penjelasannya adalah pemerintah berkomitmen penuh semaksimal mungkin menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPIH yang diputuskan pemerintah dan DPR US\$3.342 hanya komponen biaya dibayar langsung jemaah (*direct cost*) yang meliputi antara lain:

-Rate biaya penerbangan US\$1.720

-Biaya pemondokan di Mekah US\$766 (SR2.850).

-Biaya hidup selama di Arab Saudi (*living cost*) US\$405. Khusus biaya *living cost* ini dikembalikan ke setiap jemaah haji setelah tiba di Arab Saudi.

Komponen biaya yang dibayarkan setiap jemaah haji dalam bentuk BPIH tersebut mencapai sekitar 82,90% dari seluruh keperluan biaya jemaah haji. Adapun sisanya sekitar 17,10% dipenuhi dari biaya optimalisasi dana setoran awal jemaah (sekitar 14,45%), dan subsidi dari APBN dan APBNP (sekitar 2,65%).

Dana optimalisasi setoran awal jemaah haji digunakan untuk membiayai keperluan tidak langsung jemaah haji, antara lain paspor haji, asuransi, administrasi, embarkasi. Subsidi dari APBN digunakan untuk pelayanan kesehatan jemaah dan honor pelayanan petugas haji. Dengan komposisi itu, dapat dikatakan BPIH tahun ini yang paling efisien.

Tidak benar dalam BPIH terdapat komponen biaya dan aktivitas yang tidak jelas. Tidak benar bahwa *item-item* komponen biaya sebagaimana disebutkan dalam editorial itu di-

biayai dari uang jemaah. Angka-angka yang dikemukakan juga tidak seluruhnya benar.

Terkait dengan penyebutan sumber anggaran dan jumlah anggaran. Klarifikasi dan penjelasan kami, sumber dana, dana optimalisasi setoran awal BPIH. Peruntukan antara lain, untuk persiapan pengadaan *image building*, dan kerja sama liputan media elektronik, cetak, dan *online* untuk penyuluhan informasi haji.

Mengenai honor petugas Rp43,7 miliar. Klarifikasi dan penjelasannya adalah petugas haji dibiayai APBN, tetapi karena keterbatasan anggaran, masih terdapat biaya petugas haji yang dipenuhi dari dana optimalisasi setoran awal.

Penyebutan *Media center* Rp2,3 miliar dalam Editorial *Media Indonesia/Metro TV* tidak akurat. Penjelasan dan klarifikasi sumber dananya adalah dana optimalisasi setoran awal. Peruntukannya antara lain,



Dari tahun ke tahun pemerintah berupaya meringankan beban jemaah haji baik melalui subsidi APBN maupun dana optimalisasi setoran awal jemaah haji."

sejak 2006 Kementerian Agama memfasilitasi wartawan peliput kegiatan haji melalui *media center* di Jakarta dan Arab Saudi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di Tanah Air terhadap informasi yang objektif, berimbang, dan faktual tentang penyelenggara ibadah haji.

Dan soal jasa konsultasi serta *lawyer* Rp11,5 miliar, Editorial *Media Indonesia/Metro TV* tidak akurat dalam penyebutan sumber anggaran.

Komponen jasa konsultasi dan *lawyer* tidak dibiayai dari BPIH yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji.

Sumber dananya adalah, dana optimalisasi setoran awal. Peruntukan: Jasa konsultan manajemen, bantuan pelayanan hukum, konsultasi hukum, jasa konsultan keuangan BPIH, pengelolaan aset, surveillance dan sertifikasi pengembangan SMM haji (ISO 9000:2008).

Tidak benar pemerintah mengambil keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah

haji. Pemerintah tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk mengambil keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji.

Apabila terdapat dana sisa operasional, dana tersebut dimasukkan ke DAU. Bunga/manfaat dari setoran awal jemaah haji dimasukkan ke dana optimalisasi setoran awal. Baik DAU maupun dana optimalisasi setoran awal jemaah haji diatur secara penggunaan dalam UU No 13/2009 tentang Haji. Prinsip penyelenggaraan ibadah haji adalah nir laba. Pemerintah sebagai penyelenggara sama sekali tidak mendapatkan 'keuntungan'. Bahkan pemerintah setiap tahun selalu mengeluarkan subsidi melalui APBN untuk menurunkan biaya yang ditanggung jemaah haji.

Sisa anggaran itu diputuskan ke dalam deposit masif dinamai dana abadi umat (DAU), yang jumlahnya kini mencapai Rp1,7 triliun.

Malaysia, ada perbedaan prinsip antara biaya haji Malaysia dan BPIH, di antaranya:

Pemerintah Malaysia menetapkan jumlah biaya haji tertentu di bawah riil penyelenggaraan. Selisih antara yang ditetapkan riil ditanggung pemerintah melalui tabung haji.

Tahun ini Malaysia menetapkan biaya haji sebesar M\$9.980, atau setara dengan kurang lebih Rp29 juta tanpa biaya hidup (*living cost*) bagi jemaah mereka. Sepintas biaya haji Malaysia memang lebih murah, tetapi perlu diingat bahwa jemaah haji Indonesia menerima uang *living cost* sebesar SR1.500 atau US\$405 atau Rp3.750.000. Sementara itu, jemaah haji Malaysia tidak. Di sisi lain, jarak geografis Malaysia-Arab Saudi relatif lebih dekat sehingga wajar jika biaya penerbangan lebih murah. Besar BPIH jemaah haji Indonesia yang dibebankan rata-rata sebesar US\$3.342 x Rp9.300 = Rp31.080.600. Dengan demikian, besaran BPIH setelah dikurangi *living cost* adalah Rp27.330.600. Jadi tidak benar bahwa biaya haji Malaysia lebih murah daripada Indonesia.

Dan tidak benar negara/pemerintah mengeksploitasi keikhlasan jemaah haji demi menarik rente. Justru sebaliknya, dari tahun ke tahun pemerintah berupaya meringankan beban jemaah haji baik melalui subsidi APBN maupun dana optimalisasi setoran awal jemaah haji.

Tuduhan bahwa pemerintah mengeksploitasi keikhlasan jemaah haji demi menarik rente adalah tuduhan yang sangat menyesatkan, tendensius, dan menjerus fitnah.

Mengingat Editorial *Media Indonesia/Metro TV* dengan judul 'Efisiensi Pengelolaan Haji' yang dimuat/ditayangkan pada 24 Juli 2010 mengandung kesalahan yang sangat fatal dan mendasar, Kementerian Agama meminta *Media Indonesia/Metro TV* untuk memuat hak jawab ini pada kesempatan pertama, dalam bentuk revisi Editorial *Media Indonesia/Bedah Editorial* dengan teks atau yang disepakati lebih dahulu oleh Kementerian Agama.

Masyhuri AM

Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

DPR Pembolos, Mengkhianati Amanat Rakyat

BERITA anggota DPR yang terhormat yang malas kembali mencuat, bahkan kini lebih ironis. Pimpinan DPR merasa kehabisan akal mengatasi kemalasan anggota DPR kita.

Sepertinya kontroversi kemalasan anggota DPR bukanlah hal baru. Hampir dalam setiap periode selalu muncul perdebatan soal anggota DPR yang malas, terutama yang sering membolos. Kadang, datang, tanda tangan, pulang dapat uang. Namun, saat ini, praktik kemalasan anggota DPR sudah terlalu cepat. Belum setahun DPR periode 2009-2014, sikap mereka sudah disoroti.

Ironis memang, anggota DPR yang menyandang status 'yang terhormat' ternyata rajin



EDET

membolos. Kita memahami kegerahan sebagian anggota DPR terhadap rekan mereka yang malas. Predikat 'DPR pemalas' pasti akan mengena pada anggota DPR yang betul-betul mencoba menjalankan

fungsinya sebagai anggota DPR yang benar.

Praktik tercela DPR yang sudah lama terjadi jelas harus dihentikan.

Perbaikan itu membutuhkan komitmen dari pimpinan DPR

sendiri. Teladan pimpinan amat dibutuhkan. Dengan penghasilan rutin sekitar Rp60 juta dan tunjangan sekitar Rp43 juta, sikap anggota DPR yang rajin membolos adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Tindakan seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik.

Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas dari institusi atau pihak-pihak yang terkait untuk membenahi mental mangkir dan membolos para anggota dewan yang terhormat.

Jenifer Woworuntu

Komp Lenteng Agung Persada Kav 54A Jakarta Selatan
Jenifer.woworuntu@gmail.com

Menyoal Kebijakan Seragam Sekolah

MARAKNYA keluhan para orang tua terhadap mahalnya biaya program bantuan operasional sekolah (BOS) dan program-program lainnya, upaya rampangan biaya sekolah masih mengalami berbagai kendala.

Kasus yang sedang hangat dibicarakan masyarakat tentang hal ini adalah mahalnya biaya pengadaan seragam sekolah. Di banyak sekolah di Indonesia dari jenjang TK hingga SMA, siswa baru diwajibkan membeli seragam dari sekolah. Padahal biaya seragam yang

diwajibkan pihak sekolah tidaklah murah, mencapai ratusan ribu, bahkan menembus lebih dari Rp1 juta.

Erlinda Rakhmawati

Mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta